

TERM OF REFERENCE

Kongres Pejuang HAM 2009 Merebut Ruang Politik Bagi Pemajuan Hak Asasi Manusia

Latar Belakang

Sepuluh tahun silam, rejim Orde Baru di bawah pemerintahan berkuasa Soeharto telah berakhir akibat desakan perubahan yang diemban dalam gelombang reformasi. Kesempatan untuk *melahirkan* kembali demokrasi sesuai harapan yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia akibat dari keterkungkungan kebebasan sipil, diharapkan mampu memberi satu kemajuan kehidupan berdemokrasi yang lebih baik di masa depan. Dalam rentang waktu selama reformasi bergulir, demokrasi yang digunakan sebagai elemen penting untuk menyusun desain kebijakan yang berhubungan dengan urusan-urusan publik atas dasar kesetaraan politik tidak banyak mengalami perubahan.

Demokrasi elit politik yang terkonsolidasi cenderung menguat, meski ada upaya perbaikan positif dalam struktur tata pemerintahan, dengan menerapkan prinsip-prinsip rule of law, akuntabilitas dan pemberantasan korupsi yang dilakukan belakangan ini. Tidak hanya itu, menguatnya politik identitas dan globalisasi ekonomi ikut menjadi penanda dinamika perpolitikan nasional. Unsur militer secara bertahap mulai mundur dari aktivitas politik praktis, meski tidak dipungkiri dalam realita politik aktual, militer kembali mulai menunjukkan eksistensinya dengan keterlibatan aktif di panggung-panggung politik nasional dalam wujud kampanye partai politik dan forum-forum lainnya. Unsur kekuatan lokal yang mengasup praktik formal berdemokrasi demi kepentingan tersendiri pun mau tidak mau mengubah konfigurasi pemetaan demokrasi, dalam wujud pemekaran wilayah dan pemilu lokal, ikut memicu berbagai konflik kekerasan berdimensi pelanggaran atas hak asasi manusia.

Pemenuhan kewajiban negara (state obligation) dalam hal pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dipandang mulai melemah, dengan tidak berjalannya mekanisme keadilan transisional (transitional justice) sebagai wujud keberanian politik nasional dalam memutus mata rantai impunitas. Dasar keadilan yang didambakan oleh korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia banyak mendapatkan hambatan, akibat ketidakjelasan sistem mekanisme hukum yang berlaku yang lebih banyak dijadikan dalih untuk berkelit dari proses pertanggungjawaban hukum.

Di awal keruntuhan rezim Orde Baru, rezim transisi telah menjanjikan satu tekad dan komitmen politik untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Usaha tersebut terlihat dari berbagai penyelidikan yang dilakukan terkait penuntasan kasus-kasus berdimensi pelanggaran hak-hak kebebasan sipil dan politik, antara lain yang terjadi pada kasus Mei 1998, Timor Timur pasca jajak pendapat, kekerasan pada masa DOM di Aceh dan berbagai evaluasi serta perbaikan di tingkat regulasi institusi negara yang selama ini dipandang memiliki korelasi negatif dalam upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya pada institusi militer, kepolisian dan badan intelijen.

Pemerintahan pasca Soeharto (BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono) bisa dikatakan mampu meredam nafsu negara untuk melakukan kekerasan kepada masyarakat dengan terwujudnya berbagai langkah inisiatif positif dalam

beberapa kasus konflik berdimensi kekerasan. Namun disaat yang bersamaan, negara justru gagal untuk mengendalikan kekerasan sosial yang berlaku *lancung* di tengah masyarakat. Konflik-konflik kekerasan aktual yang termodifikasi dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang melibatkan unsur aktor-aktor non-negara juga mulai marak terjadi. Kebijakan nasional belum bisa memberikan jalan keluar atas permasalahan krisis ekonomi global, khususnya untuk menyelesaikan problematika sosial di tengah masyarakat, seperti upah ketenagakerjaan, politik agraria, dan jaminan sosial bagi orang miskin. Ketiadaan bentuk jaminan perlindungan atas pemenuhan hak-hak dasar sebagai bagian dari politik kewargaan menyebabkan rentannya situasi sosial di tengah masyarakat di masa depan.

Asas keadilan yang seharusnya menjadi pijakan untuk memberi ganjaran hukuman kepada para pelaku pelanggaran HAM dan kemanusiaan terbukti belum bisa memuaskan harapan publik. Akuntabilitas negara kembali dipertanyakan ketika supremasi hukum tidak bisa menjanjikan satu bentuk keadilan kepada para korban, yang mengakibatkan tarik menarik politik kepentingan antara penguasa, pelaku, korban dan elemen masyarakat lainnya. Padahal sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin penyelesaian masalah secara hukum untuk memulihkan hak-hak korban dan keluarga korban sebagai bentuk pengharapan atas kehidupan yang lebih baik.

Berkaca dari problematika di atas, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengingat belum terselesaikannya berbagai agenda penuntasan berbagai kasus pelanggaran berat HAM masa lampau. Negara telah kehilangan basis legitimasinya ketika politik identitas kian menguat dan memencarkan ruang-ruang kebebasan sipil dalam sekat-sekat normatif dalam struktur sosial masyarakat. Beratnya bobot politik tersebut tidak disertai pengelolaan informasi yang memadai bagi publik, khususnya pada akses informasi dan transfer pengetahuan seputar pelaksanaan pemilu 2009. Publik masih memandang minimnya ruang-ruang referensi pilihan politik yang progresif. Media massa yang diharapkan bisa memberikan kesempatan untuk mengembangkan wacana alternatif kepemimpinan yang mengedepankan nilai-nilai HAM kemanusiaan sebagai ujung tombaknya, justru acapkali digunakan sebagai ajang kontestasi intrik politik dan kepentingan demi mendapatkan posisi strategis di puncak kekuasaan. Kondisi demikian mampu melahirkan konflik-konflik horizontal yang tidak bisa kita nafikkan akan menguntungkan beberapa pihak secara politis.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut sudah seharusnya dijawab dengan sikap progresif, karena pada momentum 2009 kita selain dituntut untuk melakukan pengidentifikasian pilihan-pilihan berdemokrasi yang lebih baik, namun kita juga dituntut untuk menentukan sebuah pilihan yang akan membawa kita kembali kepada titik kemajuan atau justru kembali kepada titik kemunduran. Pemilu 2009 sebagai ajang inisiasi pembaharuan demokrasi lima tahunan sudah seharusnya dipandang sebagai arena strategis melibatkan partisipasi publik secara luas. Pemilu harus menjadi alat politik bagi pembaharuan pemimpin-pemimpin bangsa yang terpilih secara sah, dengan melibatkan proses perekrutan politik dimana para pemilih yang memiliki haknya mampu melakukan preferensi politik dalam mengintervensi hal tersebut.

Intervensi dalam satu sistem prosedural tersebut, sesungguhnya strategis untuk dijadikan proyek dalam menginfiltrasi program-program penegakan hak asasi manusia. Kini saatnya para pemilih sadar untuk menggunakan hak pilihnya secara tepat dengan tujuan penegakan supremasi hukum berdimensi demokrasi, HAM dan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap tersebut adalah sikap yang harus dikawal sebagai sikap politik yang terartikulasikan dengan baik sesuai dengan konteks permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi secara mutakhir.

Konsolidasi menjadi penting untuk menyamakan persepsi perubahan agar pemilu 2009 bisa menjadi suatu resolusi untuk memperbaiki keadaan yang selama ini masih mendiskriminasi hak-hak korban.

Basis kolektif yang dimiliki dalam gerakan perjuangan korban harus menjawab tantangan proses penegakan HAM. Artikulasi korban dalam ruang-ruang prosedural seperti pemilu juga akan menentukan politik Indonesia ke depan.

Tujuan Umum

Mengkonsolidasi gerakan pejuang HAM dalam merebut ruang politik pemajuan HAM.

Tujuan Kegiatan

1. Mengidentifikasi permasalahan yang menimpa rakyat yang asalnya dari negara serta ruang politik yang strategis.
2. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penegakan HAM dan kemanusiaan yang dihadapi oleh korban dan keluarga korban
3. Mengartikulasikan kepentingan-kepentingan korban pelanggaran HAM dan kemanusiaan secara lebih luas dengan melakukan pembelajaran atas gerakan politik korban diberbagai wilayah yang telah dilakukan selama ini.
4. Merumuskan sikap dan strategi gerakan pejuang HAM untuk merebut ruang politik bagi pemenuhan keadilan dan menghadang politisi anti kemanusiaan dan perubahan.
5. Merumuskan sikap politik serta rencana kerja pengorganisasian sikap tersebut dalam bentuk kerangka kerja yang mudah diimplementasikan dalam menghadapi Pemilu 2009.

Output Kegiatan

1. Ada kerangka kerja berjaringan untuk memenangi agenda HAM rakyat dari komunitas pejuang HAM
2. Ada strategi belajar bersama dan strategi untuk merebut momentum politik 2009 oleh komunitas pejuang HAM nasional
3. Ada pernyataan atau resolusi sikap politik pejuang HAM

Outcome Kegiatan

1. Mekuatnya solidaritas pejuang HAM dan terbukanya ruang belajar bersama
2. Diadopsinya suara atau agenda korban dalam kontestasi politik 2009
3. Adanya kebijakan politik yang lebih berpihak pada korban
4. Tidak terpilihnya politisi anti kemanusiaan dalam kontestasi politik.

Peserta Kegiatan

1. Perwakilan Korban dari konflik atau kasus Sumber Daya Alam (SDA), Agraria, Perburuhan, Kekerasan Negara, dan Masalah Perkotaan.
2. Perwakilan korban berasal dari seluruh Indonesia, dengan jumlah peserta sekitar 100 orang.

Kegiatan

1. Bentuk Kegiatan

- Konferensi Pejuang HAM 2009 dari seluruh Indonesia
- Seminar tentang Agenda HAM, Potensi Politik Korban, dan Pemilu 2009
- Lokakarya Perumusan Pembelajaran Peran Politik Korban
- Memorialisasi Instalasi Seni sebagai Bagian Konsolidasi Politik Korban
- Berbagi Kisah Inspiratif dan malam apresiasi seni
- Konferensi Pers dan Media Briefing
- Ulang Tahun KontraS ke-11

2. Alur Kegiatan

- a) *Persiapan Pra-Kongres Pejuang HAM 2009:*
 - Konsolidasi jaringan NGO untuk pembentukan kepanitiaan
 - Identifikasi peserta Kongres Pejuang HAM 2009
 - Sosialisasi gagasan dan tujuan Kongres Pejuang HAM 2009 ke berbagai komunitas korban di seluruh Indonesia
 - Membuat alat dan produk kampanye Kongres HAM 2009
 - Persiapan akomodasi dan pengundangan ke peserta
- b) *Pembukaan Kongres Pejuang HAM 2009:*
 - Konferensi Pers untuk Memperkenalkan Maksud dan Tujuan Kongres Pejuang HAM 2009
 - Orasi Politik
 - Prolog HAM oleh Korban
 - Pagelaran Tari dan Musik
- c) *Kongres Pejuang HAM 2009:*
 - Artikulasi Suara Korban lewat Display Memorialisasi, terdiri dari benda-benda yang terkait dengan kekerasan yang terjadi, kenangan dan pengalaman perjuangan korban (foto, gambar, pakaian, klipng dan lain-lain)
 - Konferensi pers dan lembar info media harian:

Seminar untuk mendapatkan *input* dari berbagai narasumber tentang Pemetaan politik 2009, dengan sub-tema:

1. Konstelasi Politik dan Ruang Pemajuan HAM (Rocky Gerung)
2. Konstelasi Daerah; krisis ekonomi global dan kecenderungan pelanggaran HAM ke depan (Don K Marut)
3. Dinamika Sektor Kemananan Dalam Politik Elektoral (Makmur Keliat)
4. Peran politik rakyat dalam menentukan perubahan (Antonio Prajasto)
5. Keadilan Transisi; Pemenuhan Hak Korban (Galuh Wandita)
6. Perjuangan Korban Pelanggaran HAM dan Upaya Pemenuhan Hak Korban (Edwin partogi)

Lokakarya tematik paralel para Pejuang HAM, dengan sub-tema:

1. Masalah di sektor agraria, SDA dan Perburuhan

2. Masalah Penuntasan Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu
3. Masalah Pelayanan Publik oleh Negara
4. Peran Politik Perempuan dalam Gerakan HAM

Sidang-sidang komisi untuk membuat rumusan:

1. Perumusan Sikap politik
2. Perumusan Strategi Politik
3. Perumusan Ikrar Pejuang HAM.

d) Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka

e) Penutupan:

1. Pembacaan Hasil Kongres
2. Ikrar Pejuang HAM
3. Orasi Kemanusiaan : Karlina Supeli
4. Ulang Tahun ke-11 KontraS

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa – Jum'at/17 – 20 Maret 2009

Tempat : Wisma Makara Universitas Indonesia

Pelaksana Kegiatan

Panitia Kongres Pejuang HAM 2009

KontraS, ICTJ, IKOHI, JATAM, JSKK, Kalyanamitra, KontraS, LBH Jakarta, PBHI Jakarta, SHI, Demos, Walhi, YAPPIKA, PRAXIS, Foker LSM Papua, KontraS Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, Federasi KontraS

Media Partners :

Voice of Human Rights dan Media Bersama

Sekretariat

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Alamat: Jl. Borobudur No.14 Menteng Jakarta

Telp/faks: 021 3926983, 021 3928564

Kepanitiaan

Steering Committe (SC):

wakil-wakil dari organisasi

Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)	: Oslan Purba
Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM (JSKK)	: Suciwati
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)	: Siti Maimunah
Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI)	: Sinnal Blegur
International Center for Transitional Justice (ICTJ)	: Galuh Wandita
Kalyanamitra	: Rena Herdiyani
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekekrasan (KontraS)	: Indria Fernida Yati Andriyani
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH)	: Asfinawati
Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)	: Hendrik Sirait
Serikat Hijau Indonesia (SHI)	: Koesnadi
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)	: Berry N. Furqon
Yappika	: Ajeng Kesuma

Individu-Individu

Asmara Nababan
Chalid Muhammad

Organizing Committe

Ketua	: Yati Andriyani
Sekretaris	: Ali Nursyahid
Sie Acara	: Edwin Partogi, Chrisbiantoro, Syamsul Alam Agus, Papang Hidayat, Fernandes, Rizky, Beggy, Lulu, Ki Agus Ahmad, Hikmah, M. Islah, Mariamah, Mira
Kesekretarian	: Heryati, Neneng, Helmi Apti, Intan Ruwaidah, Astri, Poltak, Iqbal
Public Relation (Media)	: Erwin Usman, Erick, Andi Panca Kurniawan, SC
Kuangan	: Faninda Wiryawan, Rintarma Asi
LO	: M. Daud, Adrian Budi S, Jhon
Perlengkapan	: Viktor Da Costa, Heri, Kabul Hendrawan, Hans, Apit, Ozzi, Allan, Darma
Dokumentasi	: Andi Panca Kurniawan, M. Harits, Adrian Sentosa
Artistik	: Bambang Prihadi, Puri Kencana P, Aidil
Publikasi&alat kampanye:	Harist, Intan, Heru, Putri Kanesia,
Kesehatan	: Bustami, Kitty
Keamanan	: Sinung Karto, Alfonso Sudargo, Tulus, Freddy
Konsumsi	: Nura'ain

Kordinator Wilayah:

Jawa	: Daud
Sumatera	: Bustami
Sulawesi	: Gendo
Kalimantan	: Begi
Maluku	: Gendo
Papua	: Islah
NTT, NTB, Bali	: Viktor
Jabotabek	: Neneng

RUANG MEMORIALISASI DAN PERLENGKAPANNYA

Ruang Memorialisasi (Ruang Ingatan dan Perkenalan)

Dalam kegiatan Kongres akan disediakan ruang memorialisasi (ruang ingatan dan perkenalan) yang berisi benda-benda yang terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM dan pengalaman perjuangan atau advokasi yang dilakukan oleh korban

Ruangan ini juga akan dijadikan sarana untuk saling mengenal dan mengapresiasi antar peserta dan pengetahuan tentang sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi.

Material Ruang Memorialisasi yang harus dibawa Peserta:

Benda-benda yang terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dan pengalaman serta perjuangan korban, misalkan; kliping media, photo, film, pakaian, catatan harian, patung, lukisan, kronologis kasus, sandal, sepatu, dan segala benda yang mewakili peristiwa.

Penanda Letak Geografis Kasus Pelanggaran HAM

Untuk menandakan letak geografis sebuah pelanggaran HAM. Peserta diminta membawa benda-benda atau apapun yang berciri khas dengan wilayah yang diwakilinya, misalkan; alat kesenian, kain, pakaian, makanan atau minuman, atau apapun yang sifatnya tidak memberatkan atau membebani peserta.

Mekanisme Pengisian dan Ruang Memorialisasi

- Panitia menyiapkan ruang memorialisasi sejak pembukaan check in tanggal 16/3, pukul 14.00-18.30 Wib, berdasarkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi.
- Penataan ruang memorialisasi dilakukan oleh peserta dengan dibantu oleh panitia pada tanggal 16/3 sejak pukul 14.00-18.30 Wib

Kunjungan ke Ruang Memorialisasi

- Kunjungan ke ruang memorialisasi akan dibuka pada tanggal 16/3, pukul 17.30 Wib
- Kunjungan dilakukan dari instalasi kasus yang satu ke kasus yang lain
- Saat proses kunjungan peserta dari masing-masing kasus menjelaskan tentang kasus yang terjadi dan menjelaskan isi dari ruang memorialisasi kasus tersebut.

